



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kekuatan, rahmat dan kerunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta pagu indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk Tahun 2026. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026.

Renja ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan. Selain itu, Renja ini juga merupakan instrumen penting untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi pemuda, serta mendorong prestasi olahraga di Kabupaten Blitar.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik perangkat daerah terkait, pemangku kepentingan, maupun masyarakat melalui forum Musrenbang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta kontribusi dalam penyusunan Renja ini.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2026, serta menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepemudaan dan olahraga.

Blitar,

Agustus 2025 KEPALA

DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



ANINDYA PUTRA ROBERTUS, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710414 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5 Penelitian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	40
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 Kabupaten Blitar	9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	24
Tabel 2.3 Analisis SWOT Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.....	27
Tabel 2.4 Pemetaan Isu Strategis dengan Strategi dan Arah Kebijakan	28
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Blitar	31
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Blitar.....	36
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026	40
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan maju Tahun 2027 Kabupaten Blitar	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada Tahun 2025-2029	37
Gambar 3.2 Keterkaitan Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan serta menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar berkewajiban menyusun Renja sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, serta tolok ukur kinerja tahunan. Renja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pembangunan daerah khususnya di bidang kepemudaan dan olahraga pada tahun 2026

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan tersebut terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan. Dokumen rencana pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah disusun secara paralel dengan penyusunan RKPD. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renja sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan berpedoman pada RKPD. Selanjutnya, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Dengan demikian, Renja memiliki posisi strategis dalam menjembatani dokumen perencanaan jangka

menengah dengan dokumen penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran indikatif yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. RKPD juga menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai sejauh mana capaian kinerja tahun sebelumnya.

Sementara itu, dasar kelembagaan dan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar diatur melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dengan fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengoordinasian, serta fasilitasi di bidang kepemudaan dan olahraga.

Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah, sekaligus mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Blitar, khususnya dalam pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- k. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026;
- p. Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar;
- q. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 73/E);.

- r. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;
- s. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta menentukan sasaran dengan skala prioritas sebagai pedoman penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja kegiatan PD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Melaksanakan pembangunan agar tepat sasaran dan tepat waktu;
- c. Memberikan penetapan alokasi anggaran yang dibutuhkan secara transparan dan akuntabel;
- d. Memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan, serta alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pada Bab ini berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

Bab ini berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan inputan Renja pada SIPD Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 dan 2024 terhadap capaian Renstra Tahun 2021-2026. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2024 dan 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Blitar periode 2021-2026 serta Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian, capaian kinerja pada periode tersebut masih menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan lama. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 beberapa target telah tercapai bahkan ada yang melebihi rencana, seperti pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan target kinerja 34% dapat terealisasi 54,05% didukung oleh peningkatan prestasi di 20 cabang olahraga dari total 37 cabang yang ada di Kabupaten Blitar melalui beberapa event olahraga.

Memasuki tahun berjalan 2025, meskipun capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sudah disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra lama periode 2021-2026. Tapi secara sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya telah dinonaktifkan karena adanya Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini

menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur sub kegiatan dan indikator kinerja dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi untuk tahun 2025 tidak dilakukan perbandingan langsung dengan capaian Renja tahun 2023-2024. Secara umum, pelaksanaan Renja 2023 dan 2024 menunjukkan tren positif, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Evaluasi ini menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan Renja 2026, yang sepenuhnya akan diselaraskan dengan RPJMD 2025-2029 dan regulasi terbaru.

Adapun secara rinci pencapaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2025, sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025
Kabupaten Blitar

SKPD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
2	19				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	81	78	79	79	100%	100	80	99%
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	dokumen	13	13	13	13	100%	13	13	100%
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	2	4	4	100%	4	4	100%

2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	8	7	8	8	100%	8	8	100%
2	19	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	laporan	12	10	12	12	100%	12	12	100%
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	20	10	10	10	100%	20	20	100%
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	unit	14	1	1	1	100%	14	1	7%
2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	1	2	2	100%	2	2	100%
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	bulan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	5	1	1	100%	1	1	100%

2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	1	2	1	1	100%	1	1	100%
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	2	1	1	100%	1	1	100%
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	4	1	1	100%	1	1	100%
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40	100	40	40	100%	42	40	100%
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	12	100%	12	12	100%

2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	12	12	13	108%	12	13	108%
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	30	30	30	20	67%	30	30	100%
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Kepemudaan	%	24	20	22	22	100%	25	23	96%
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Wirausaha Pemula yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas daya saing	Orang	56	50	55	55	100%	56	55	98%
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	-	5	5	5	100%	-	-	-
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	-	100	100	100	100%	-	-	-

2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	-	125	150	150	100%	-	-	-
2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	orang	-	2	2	2	100%	-	-	-
2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	-	2	2	2	100%	-	-	-
2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	unit	-	1	2	2	100%	-	-	-
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda Dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	orang	-	10	10	10	100%	-	-	-

2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	orang	-	100	150	150	100%	-	-	-
2	19	02	2.01	0009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	orang	-	84	84	84	100%	-	-	-
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1	100%
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	300	-	-	-	-	300	300	100%
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang	50	-	-	-	-	50	48	96%

2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	1	100%
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	100	-	-	-	-	110	90	90%
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	3	-	-	-	-	3	3	100%
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	280	-	-	-	-	280	10	4%
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang mendapat Pembinaan	Organisasi/ Kelompok	7	32	34	34	100%	7	7	100%
2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	orang	-	2	2	2	100%	-	-	-
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	dokumen	-	175	200	200	100%	-	-	-

2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, Singkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	-	-	-	-	1	1	100%
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Singkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	2	#VALUE!
2	19	03			PRPGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Atlet yang masuk Puslatda Jatim	%	3,28	3	3,18	3,18	100%	4,08	3,57	109%
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibina	Sekolah	-	26	27	27	100%	-	-	-
						Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang memenuhi standart	Unit	0	-	-	-	-	1	0	-
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pembinaan Dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	-	10	10	10	100%	-	-	-

2	19	04	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	-	3	3	2	67%	-	-	-
2	19	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	2	-	-	-	-	2	2	100%
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	Kejuaraan	8	1	1	1	100%	9	2	25%
2	19	04	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	-	1	1	1	100%	-	-	-
2	19	04	2.02	0002	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	-	5	5	5	100%	-	-	-
2	19	04	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	8	1	1	1	100%	9	1	13%
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	Cabang Olahraga	44	13	13	13	100%	44	43	98%
2	19	04	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	dokumen	-	1	1	1	100%	-	-	-

2	19	04	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	130	-	-	-	-	200	0	0%
2	19	04	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	22	-	-	-	-	15	17	77%
2	19	04	2.03	0010	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1	100%
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi/kelompok olahraga yang dibina	Organisasi/ Kelompok	13	2	2	2	100%	14	12	92%
2	19	04	2.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	dokumen	-	25	30	30	100%	-	-	-
2	19	04	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	-	3	3	3	100%	-	-	-
2	19	04	2.04	0006	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1	100%
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	Kelompok	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	19	04	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen	-	4	4	4	100%	-	-	-
2	19	04	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	laporan	-	2	2	2	100%	-	-	-

2	19	04	2.05	0003	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	dokumen	-	1	1	1	100%	-	-	-
2	19	04	2.05	0004	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	dokumen	-	1	1	1	100%	-	-	-
2	19	04	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	laporan	1	-	-	-	-	1	0	0%
2	19	04	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1	100%
2	19	04	2.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota Pramuka yang aktif	%	34	30	30	30	100%	36	32	94%
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan	Organisasi	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	dokumen	-	1	1	1	100%	-	-	-
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	organisasi	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	-	50	50	50	100%	-	-	-

2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	1	1	1	1	100%	1	0	0%
2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	1	-	-	-	-	1	0	0%
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	organisasi	-	2	2	2	100%	-	-	-

2.1.1. Realiasi Program/Kegiatan

Realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2024 dapat dibedakan kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada level sub kegiatan masih terdapat beberapa yang belum mencapai target sepenuhnya. Pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota realisasasi kinerjanya hanya mencapai 67% dari target

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang positif. Beberapa program dan kegiatan berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 79%, dapat terealisasi 79%, tingkat realisasi 100%;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; dengan target kinerja 22%, dapat terealisasi 22%, tingkat realisasi 100%;
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dengan target kinerja 3,18%, dapat terealisasi 3,18%, tingkat realisasi 100%;
- d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan target kinerja 30%, dapat terealisasi 30%, tingkat realisasi 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Terdapat sub kegiatan yang realisasinya melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian realisasi sebesar 108% dari target.

Selain itu, terdapat pula beberapa sub kegiatan yang hingga saat ini maupun periode sebelumnya belum dijalankan karena memang dijadwalkan untuk mulai dilaksanakan pada tahun 2026/2027. Dengan demikian, capaian realisasi pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya masih belum dapat ditampilkan. Kondisi ini bukan menunjukkan kegagalan, melainkan merupakan konsekuensi dari tahapan perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra PD

2.1.2. Faktor Penyebab

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja diatas antara lain:

- a. Belum tercapainya target: karena keterbatasan anggaran, hambatan teknis, serta sumber daya manusia yang masih terbatas;
- b. Tercapainya target: pelaksanaan yang sesuai rencana, dukungan stakeholder, serta partisipasi aktif masyarakat/pemuda;
- c. Melebihi target: efisiensi penggunaan anggaran dan kebutuhan operasional yang melebihi;
- d. Belum dilaksanakan: adanya sub kegiatan yang memang baru akan di jalankan pada tahun 2026/2027 sesuai dengan tahapan Renstra.

2.1.3. Implikasi terhadap Capaian Renstra PD

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi yang tidak memenuhi target berimplikasi pada terhambatnya pencapaian Renstra PD, khususnya dalam penyediaan sarana, prasarana, dan menyebabkan beban target pada periode berikutnya menjadi lebih berat;
- b. Realisasi yang memenuhi target berkontribusi positif terhadap tercapainya sasaran Renstra PD, serta menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan program sesuai arah kebijakan pembangunan daerah;

- c. Realisasi yang melebihi target berdampak positif pada percepatan pencapaian sasaran Renstra PD dan menjadi *best practice* untuk kegiatan sejenis pada periode berikutnya;
- d. Realisasi yang belum dilaksanakan, baru akan dimulai Tahun 2026/2027 tidak berdampak negatif terhadap evaluasi capaian tahun berjalan, namun perlu dipastikan kesiapan regulasi, anggaran dan koordinasi agar pada tahun pelaksanaan nanti dapat langsung optimal dalam mendukung Renstra PD.

2.1.4. Tindak Lanjut/Kebijakan

Untuk mengatasi kendala dan memaksimalkan capaian kinerja kedepan, diperlukan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi perencanaan anggaran dan penjadwalan kegiatan;
- b. Monitoring Internal terhadap pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu;
- c. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyediaan sarana dan prasarana;
- d. Mempertahankan konsistensi capaian program yang telah sesuai target;
- e. Mengembangkan model kegiatan yang berhasil agar dapat direplikasi pada program lainnya;
- f. Melakukan persiapan teknis maupun administratif terhadap sub kegiatan yang baru akan dilaksanakan di Tahun 2026/2027, sehingga capaian dapat langsung optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Indikator kinerja merupakan *Outcome* beberapa program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Tujuannya agar pelaksanaan dari berbagai macam program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur bukan dari penyerapan anggaran maupun *Output* tetapi harus sampai kepada pencapaian kinerja hasil (*Outcomes*). Rincian Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran			79%	80%	81%	82%	79%	80%	81%	82%	
2	Presentase Pemuda yang aktif dalam Kegiatan Kepemudaan			22%	23%	24%	25%	22%	23%	24%	25%	
3	Presentase Atlet yang Masuk Puslatda Jatim			3,18%	3,57%	3,82%	4,08%	3,18%	3,57%	3,82%	4,08%	
4	Presentase Anggota Pramuka yang Aktif			30%	32%	34%	36%	30%	32%	34%	36%	

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Tahun 2024, seluruh indikator kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah tercapai sesuai target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Keberhasilan ini menjadi landasan penting untuk pengutan program pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai tindak lanjut dari capaian tersebut, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan yaitu, antara lain:

- a. Pemeliharaan kinerja dengan menjaga konsistensi capaian indikator;
- b. Inovasi program guna meningkatkan kepuasan pegawai, partisipasi pemuda, dan keaktifan organisasi pramuka;
- c. Penguatan pembinaan atlet melalui peningkatan kualitas pelatihan dan kerja sama lintas sektor;
- d. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar indikator kinerja tetap terukur, akuntabel, dan relevan dengan arah pembangunan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, telah menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pembinaan kepemudaan, serta pengembangan olahrag. Secara umum, Capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2024 berjalan dengan baik. Sebagian besar program dan kegiatan telah memenuhi target yang direncanakan, bahkan terdapat sub kegiatan yang melampaui target, seperti penyediaan jasa pemeliharaan dan biaya perizinan kendaraan dinas dengan capaian 108%. Namun demikian, masih ada sub kegiatan yang realisasinya belum optimal, antara lain pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga, yang masing-masing baru mencapai 67% dari target. Selain itu, terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dijalankan pada tahun berjalan karena memang dijadwalkan untuk mulai dilaksanakan pada periode 2026/2027 sesuai tahapan Renstra PD. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Dispora secara keseluruhan cukup positif, namun masih ada hal-hal kritis yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait pemeliharaan sarana olahraga, efektivitas koordinasi, dan kesiapan pelaksanaan program pada tahun mendatang.

Disamping capaian tersebut, pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga masih menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan. Pada bidang olahraga, keterbatasan sarana dan prasarana seperti gedung olahraga, lapangan, serta venue khusus pertandingan masih menjadi kendala utama dalam mendukung aktivitas olahraga masyarakat maupun pembinaan atlet. Selain itu, kompetisi olahraga untuk usia pelajar belum terlaksana secara optimal sehingga ruang pengembangan bakat dan prestasi generasi muda masih terbatas. Demikian pula pada bidang kepemudaan, pelaksanaan event-event pembinaan belum maksimal dalam menjangkau partisipasi pemuda secara luas.

Hambatan lain yang juga dihadapi meliputi keterbatasan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi internal perangkat daerah maupun mitra eksternal yang mendukung kegiatan kepemudaan

dan olahraga. Kondisi tersebut diperparah dengan belum tersedianya gedung olahraga terpadu yang dapat difungsikan sebagai pusat aktivitas olahraga sekaligus sarana pengembangan kreativitas pemuda. Dari sisi pendanaan, dukungan anggaran untuk pengembangan sarana olahraga masih terbatas sehingga membatasi ruang gerak program pembinaan. Selain itu, minat generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan kepemudaan masih relatif rendah, sehingga dibutuhkan pendekatan dan inovasi program agar lebih sesuai dengan kebutuhan serta minat mereka.

Permasalahan dan hambatan tersebut, berimplikasi langsung terhadap pencapaian visi Kabupaten Blitar “Berdaya dan Berjaya” serta misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif, berakhlak, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan yang baik, dan berdaya saing. Keterbatasan sarana olahraga, belum optimalnya penyelenggaraan kompetisi usia pelajar, serta rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan kepemudaan menyebabkan pelayanan dan pembinaan yang diberikan Dispora belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menghambat upaya pembentukan pemuda yang sehat, produktif, kreatif, dan siap berdaya saing, sebagaimana diamanatkan dalam misi daerah. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program turut berdampak pada lambatnya peningkatan prestasi olahraga daerah serta belum maksimalnya pembinaan kepemudaan secara berkelanjutan. Apabila hal ini tidak segera diatasi, maka pencapaian misi daerah untuk menyiapkan generasi muda Blitar yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045 dapat terhambat, sehingga arah pembangunan jangka menengah tidak berjalan optimal.

Analisis terhadap kondisi capaian, permasalahan, hambatan dan, dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah menunjukkan adanya faktor internal yang dapat menjadi kekuatan maupun kelemahan, serta faktor eksternal yang menghadirkan peluang sekaligus ancaman/tantangan. Untuk memperjelas pemetaan kondisi tersebut, berikut disajikan analisis SWOT Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar:

Tabel 2.3

Analisis SWOT Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar



Berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dispora Kabupaten Blitar memiliki sejumlah kekuatan yang dapat dioptimalkan, terutama dukungan regulasi dan komitmen pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang harus segera dibenahi, seperti keterbatasan sarana prasarana, SDM, dan anggaran. Di sisi lain, peluang besar hadir melalui bonus demografi pemuda, perkembangan teknologi, serta dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan sektor kepemudaan dan keolahragaan. Akan tetapi, tantangan yang muncul juga tidak ringan, antara lain risiko pengangguran pemuda, rendahnya partisipasi dalam pembinaan, serta pengaruh perubahan budaya global. Dengan demikian, strategi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan ke depan perlu diarahkan pada penguatan keunggulan internal, pemanfaatan peluang eksternal,

sekaligus meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman yang ada.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, identifikasi isu-isu strategis menjadi dasar penting untuk merumuskan arah pembangunan kepemudaan dan olahraga. Isu-isu tersebut kemudian dipadukan dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih fokus, terarah, serta selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah. Pemanduan isu strategis dengan strategi serta arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi memiliki relevansi langsung dengan langkah penyelesaian yang direncanakan. Dengan demikian, isu-isu penting tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga terhubung dengan kebijakan operasional yang dapat diimplementasikan secara nyata. Berikut disajikan tabel pemetaan antara isu strategis, strategi dan, arah kebijakan sebagai upaya penyelarasan:

Tabel 2.4

Pemetaan Isu Strategis dengan Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Bonus demografi pemuda yang berisiko menjadi beban jika tidak diberdayakan	Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan	Menumbuhkan nasionalisme, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas
2	Masih rendahnya partisipasi dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan	Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama	
3	Bonus demografi pemuda yang besar belum sepenuhnya dioptimalkan	Peningkatan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan	Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri, masyarakat, bangsa dan negara
4	Masih adanya ancaman penyalahgunaan narkoba, miras, serta penyakit menular di kalangan pemuda	Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, miras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda	
5	Belum optimalnya sistem pembinaan dan pengembangan olahraga yang terpadu dan berkelanjutan	Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan	Penguatan manajemen olahraga berwawasan kewirausahaan, dan pariwisata olahraga

6	Belum optimalnya pembinaan dan kompetensi olahraga usia pelajar	Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan presentasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan	Pembentukan sentra latihan olahraga unggulan dan penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama
7	Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah bersedia untuk mendukung pembinaan olahraga	

Dengan demikian, isu-isu strategis yang telah diidentifikasi terbukti selaras dengan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar. Keselarasan ini memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan tidak hanya menjawab permasalahan aktual, tetapi juga mendukung pencapaian visi Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya melalui pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang terpadu, partisipatif dan berkelanjutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perubahan OPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD 2026 Kabupaten Blitar terdapat 1 (satu) program rutin dan 3 (tiga) Program yang menjadi tanggung jawab sesuai tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar maka pada tahun 2026, program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Blitar

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

NO	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	81%	2.991.651.472,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	81%	2.685.211.043,96	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	13 Dokumen	4.599.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	13 Dokumen	3.772.752,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	1.907.855.672,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	1.506.910.992,27	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	14 Unit	8.476.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	14 Unit	8.048.040,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	337.737.280,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	242.587.113,13	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	462.815.584,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	723.889.311,60	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	270.167.136,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	200.002.834,96	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kab. Blitar	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan	24%	7.326.483.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kab. Blitar	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan	24%	8.308.270.780	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemula dan Pemuda Kader yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas daya saing	55.50 Orang	7.176.483.000,00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemula dan Pemuda Kader yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas daya saing	55.50 Orang	8.158.270.780	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	jumlah organisasi kepemudaan yang mendapat pembinaan	7 Organisasi	150.000.000,00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	jumlah organisasi kepemudaan yang mendapat pembinaan	7 Organisasi	150.000.000	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kab. Blitar	Persentase atlet yang masuk Puslatda Jatim	3,82%	7.495.733.300,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kab. Blitar	Persentase atlet yang masuk Puslatda Jatim	3,82%	8.709.675.930	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang memenuhi standar	0 Unit	36.509.400,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang memenuhi standar	0 Unit	200.000.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	8 Kejuaraan	524.702.400,00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	8 Kejuaraan	859.675.930	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Blitar	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	44 Cabang Olahraga	738.877.500,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Blitar	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	44 Cabang Olahraga	900.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Blitar	Jumlah organisasi/kelompok olahraga yang dibina	13 Organisasi / Kelompok	5.955.300.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Blitar	Jumlah organisasi/kelompok olahraga yang dibina	13 Organisasi / Kelompok	6.500.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Blitar	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	1 Kelompok	240.344.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Blitar	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	1 Kelompok	250.000.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kab. Blitar	Persentase anggota Pramuka yang aktif	34%	552.249.400,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kab. Blitar	Persentase anggota Pramuka yang aktif	34%	306.513.455	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Blitar	Jumlah organisasi kepramukaan	1 Organisasi	552.249.400,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Blitar	Jumlah organisasi kepramukaan	1 Organisasi	306.513.455	

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 menunjukkan bahwa substansi program, indikator, target capaian dan lokasi pelaksanaan tetap konsisten, sementara perbedaan hanya terjadi pada besaran kebutuhan dana. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan mengalami efisiensi anggaran, sedangkan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan mengalami peningkatan alokasi dana sesuai hasil analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan. Penyesuaian ini memastikan arah kebijakan dan target kinerja tetap terjaga dengan dukungan pendanaan yang lebih proposional dan realistis terhadap kemampuan fiskal daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

Tujuan Musrenbang RKPD, yang pertama adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Kedua, membaca dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Ketiga, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD tentu harus disusun dulu RKPD-nya. Dimulai dari persiapan penyusunan RKPD yang kemudian dihasilkan output berupa Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD ini diverifikasi hingga menjadi Rancangan RKPD. Rancangan

RKPD inilah yang dibahas di Musrenbang RKPD yang kemudian jadi Rancangan Akhir yang digunakan untuk penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara).

Pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang kemudian dimasukan ke dalam SIPD dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian Hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar tahun 2026

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Blitar

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

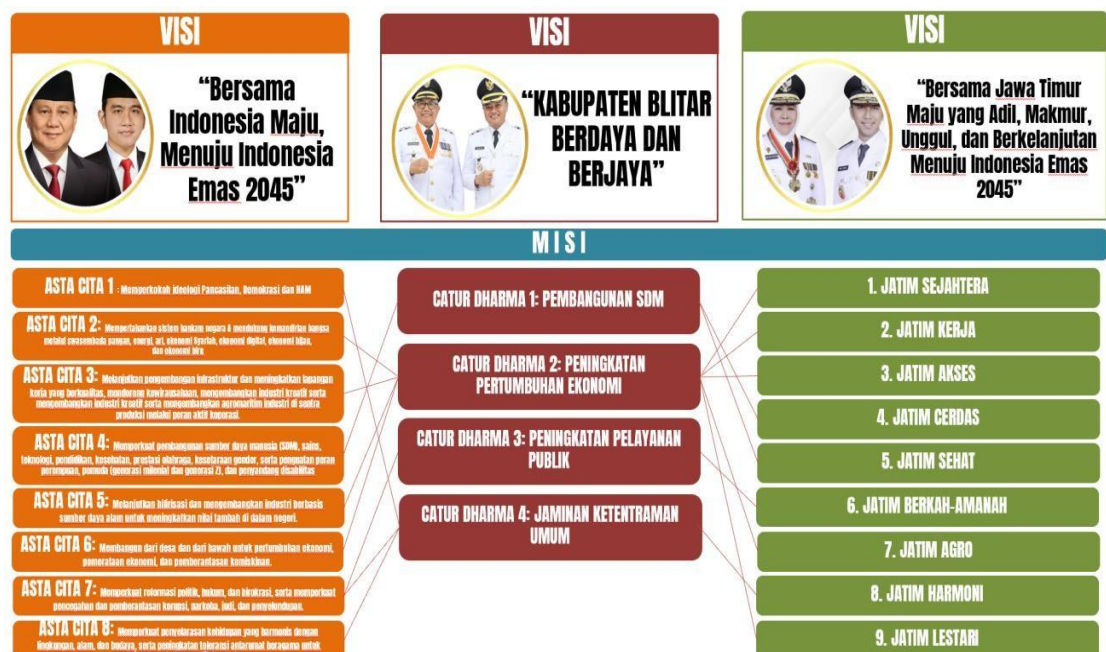
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
	Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha Pemula	Kab. Blitar		14	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga				
	Pengembangan Keolahragaan (Event Keolahragaan)	Kab. Blitar		1	
	Bantuan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	Kab. Blitar		22	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, penyusunan Renja PD perlu diawali dengan telaahan terhadap kebijakan yang lebih tinggi. Telaahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak berjalan sendiri, melainkan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Telaahan ini juga menjadi dasar bagi perumusan program prioritas Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Blitar, sehingga setiap langkah operasional dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian Visi RPJMN, Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Visi RPJMD Kabupaten Blitar. Dengan demikian, program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dipastikan selaras, sinergi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan penyelarasan agenda prioritas Kabupaten Blitar 2025-2029 dengan prioritas Jawa Timur dan Nasional 2025-2029:



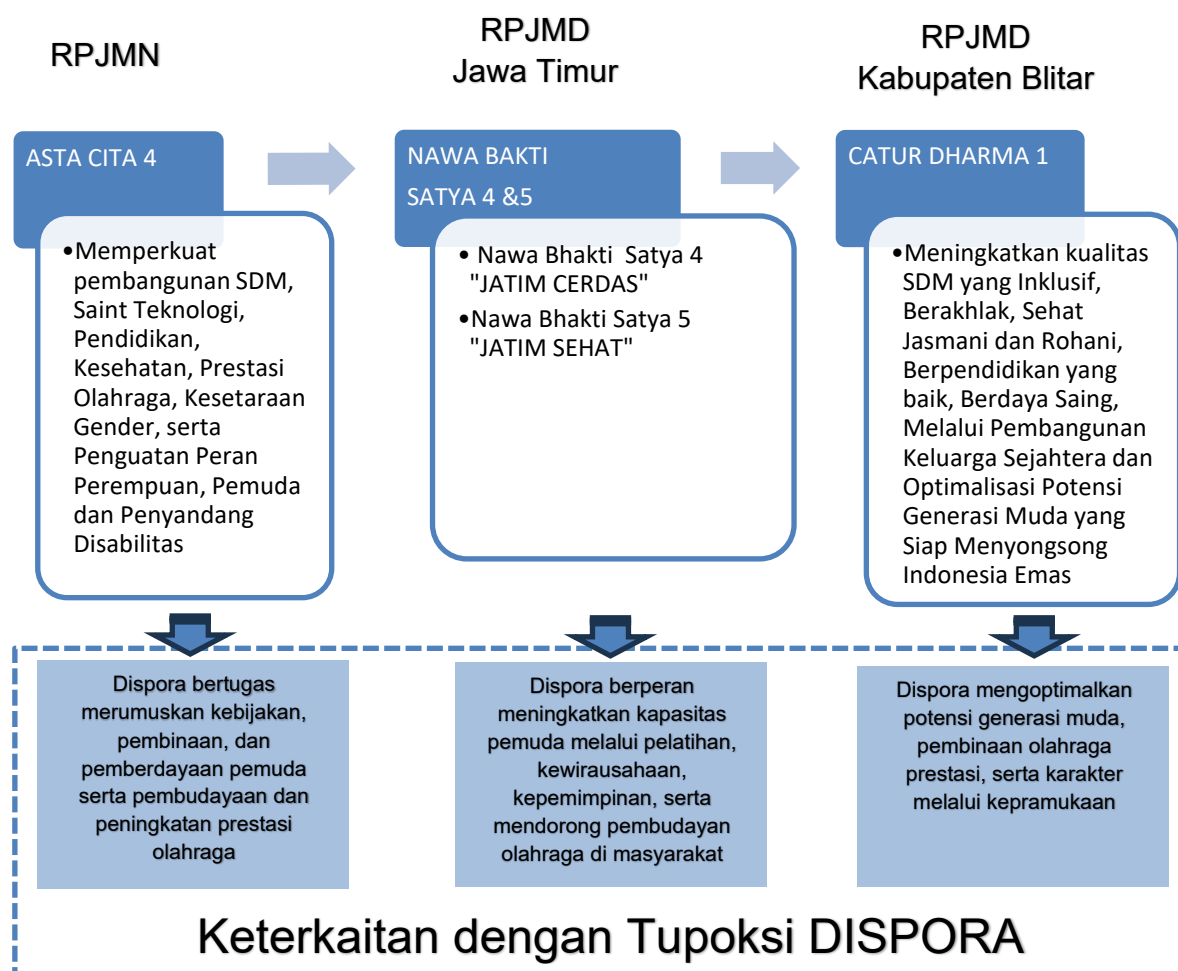
Gambar 3.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional. Pada Tahun 2025-2029 (Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029, hal III-3).

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah agenda pembangunan nasional dan daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan urusan kepemudaan dan olahraga. Pada tingkat nasional, arah kebijakan dituangkan dalam Asta Cita 4 RPJMN, Pada tingkat Provinsi Jawa Timur, tercermin dalam Nawa Bhakti Satya 4 “JATIM CERDAS” dan Nawa Bhakti Satya 5 “JATIM SEHAT” , sedangkan di tingkat Kabupaten Blitar, dituangkan dalam Catur Dharma 1 “Pembangunan SDM”. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, serta pembudayaan dan
3. peningkatan prestasi olahraga;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Keterkaitan ini menjadi landasan penting bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan di semua level pemerintahan. Berikut adalah skema keterkaitan Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar:



Gambar 3.2 Keterkaitan Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki keterhubungan yang kuat mulai dari kebijakan nasional hingga daerah, dan menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional maupun visi daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dilakukan dengan memperhatikan arah pembangunan nasional, provinsi, dan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kabupaten Blitar. Selain itu, tujuan tahunan ini juga disusun berdasarkan isu strategis serta permasalahan yang dihadapi pada bidang kepemudaan dan olahraga. Untuk menjaga konsistensi dengan tujuan Renstra, maka tujuan Renja tahun berjalan difokuskan pada satu rumusan besar yang dapat mengakomodasi seluruh aspek kepemudaan dan keolahragaan. Dengan demikian, tujuan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

“Meningkatkan Kualitas dan Kontribusi Pemuda Serta Pembinaan Prestasi Olahraga dalam Pembangunan Daerah”

Untuk memperjelas arah pencapaian tujuan tersebut, sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar tahun 2026 dirumuskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026

Tujuan Renja	Sasaran Renja
Meningkatnya Kualitas dan Kontribusi Pemuda serta Pembinaan Prestasi Olahraga dalam Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Meningkatkan Daya Saing dan Partisipasi Pemuda 3. Meningkatkan Jumlah Atlet yang Masuk Puslatda Jatim 4. Meningkatkan Anggota Pramuka yang Aktif

Sasaran Renja tahun 2026 disusun untuk menjawab isu strategis pada bidang kepemudaan dan olahraga. Fokus utamanya adalah meningkatkan daya saing dan partisipasi pemuda, dan meningkatkan jumlah atlet yang masuk puslatda Jatim. Disamping itu, sasaran juga

diarahkan untuk meningkatkan anggota pramuka yang aktif. peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran turut menjadi sasaran guna memperkuat tata kelola kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.009.671.208,96				22.744.019.030,4
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2.685.211.043,96				2.712.063.154,4
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.685.211.043,96				2.712.063.154,4
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran (%)		92	2.685.211.043,96			94	2.712.063.154,4
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Blitar		3.772.752	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.810.479
	Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		8	3.772.752			8	3.810.479
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah (Dokumen)		1				1	

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		4			4	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Blitar		1.506.910.993	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.521.980.102
	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		20	1.506.910.993		21	1.521.980.102
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12			12	
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kab. Blitar		8.048.040	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8.128.520
	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	8.048.040		2	8.128.520
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Blitar		242.587.112	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		245.012.985
	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	242.587.112		1	245.012.985
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		40			42	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1			1	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1			1	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1			1	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1			1	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Blitar		723.889.312	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		731.128.205

	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	723.889.312			12	731.128.205
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12				12	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12				12	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Blitar		200.002.834,96	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			202.002.863,4
	Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	200.002.834,96			1	202.002.863,4
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		13				13	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		31				32	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				8.308.270.780				10.684.147.552
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)		24	8.308.270.780			25	10.684.147.552
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Kab. Blitar		8.158.270.780	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.484.147.552
	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemula dan Pemuda Kader yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas daya saing	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)		300	8.158.270.780			300	10.484.147.552
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)		10				20	

		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)		1			1	
		Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)		100			110	
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)		1			1	
		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)		280			280	
		Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)		260			660	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Blitar		150.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000
	jumlah organisasi kepemudaan yang mendapat pembinaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)		1	150.000.000		1	200.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				8.709.675.930			9.010.643.523
	Meningkatnya Jumlah Atlet yang masuk PUSLATDA JATIM	Persentase atlet yang masuk Puslatda Jatim (%)		3,82	8.709.675.930		4,08	9.010.643.523
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Blitar		200.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000
	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang memenuhi standar	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)		2	200.000.000		2	200.000.000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Blitar		859.675.930	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		850.000.000

	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)		8	859.675.930			9	850.000.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Kab. Blitar		900.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			650.000.000
	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)		22	900.000.000			15	650.000.000
		Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)		1				1	
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)		130				200	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Kab. Blitar		6.500.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.050.000.000
	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	6.500.000.000			1	7.050.000.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Kab. Blitar		250.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			260.643.523
	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)		1	250.000.000			1	260.643.523
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)		1				1	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				306.513.455				337.164.801
	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Aktif	Persentase Anggota Pramuka Aktif (%)		34	306.513.455			36	337.164.801
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan	Kab. Blitar		306.513.455	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			337.164.801

	Meningkatnya jumlah anggota pramuka yang aktif	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)		1	306.513.455			1	337.164.801
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)		1				1	
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)		1				1	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang baru, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyesuaikan dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, pada tahun 2026 akan melaksanakan 4 (empat) program yang dilaksanakan melalui 14 (empat belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Rencana anggaran yang ditetapkan adalah Rp. 20.009.671.208,96 yang sumber dananya dari dana

transfer umum-dana alokasi umum (DAU), rincian Program yang direncanakan, antara lain:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) kegiatan, antara lain:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 13 dokumen perencanaan dan pelaporan beberapa diantaranya RENJA, RENJA-P, RKA, RKA-P, LKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan evaluasi kinerja per tribulan.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja 4 dokumen berupa CALK, DPA, Neraca dan LRA.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target kinerja lapran administrasi barang yang akuntabel.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja 12 bulan penyediaan kebutuhan Dinas, berupa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target kinerja 12 bulan penyediaan jasa penunjang, antara lain Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang menyediakan pos gaji bagi para Tenaga Harian Lepas.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 12 bulan pelayanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan didukung 2 (dua) kegiatan, antara lain :
 - a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha

- Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan didukung 5 (lima) kegiatan yakni :
- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan didukung 1 (satu) kegiatan yakni Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan untuk meningkatkan kualitas anggota pramuka aktif

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja 2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2026 telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2026 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan Kepemudaan dan Olahraga.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini bersifat mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar dengan memuat arah kebijakan, sasaran kegiatan, serta program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.

RENJA menguraikan program bidang kepemudaan dan olahraga, diharapkan dengan didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga maka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar tahun 2026 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar.

Blitar, September 2025

KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN
OLAH RAGA


ANINDYA PUTRA ROBERTUS, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710414 199803 1 010

